



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW 5210 3812436 FAKSIMILE 34834814
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S- **3960** /PB.1/2018 4 Mei 2018
Sifat : Segera
Lampiran : Tiga Lembar
Hal : Permintaan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah/Satker Pusat
Periode Tahun Anggaran 2017 *Audited*

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
2. Kuasa Pengguna Anggaran Satker SPAN
3. Kuasa Pengguna Anggaran Satker KSAP
4. Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sehubungan dengan berakhirnya penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (BA 01508) Tahun Anggaran 2017 dan menunjuk Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Unit Eselon I Ditjen Perbendaharaan (BA 015) Tahun 2017 yang dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 *Audited*, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah DJPb/Satker Pusat yang mengalami perubahan nilai laporan keuangan TA 2017 *Unaudited* sebagaimana terlampir pada lampiran Nota Kesepakatan Angka Asersi Final, dan Kantor Wilayah DJPb yang terdapat temuan BPK terkait dengan Tanah/Gedung Bangunan berstatus sengketa yaitu pada Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Utara, agar menyampaikan **hardcopy** dan **softcopy** laporan keuangan tingkat wilayah/satker pusat periode tahun anggaran 2017 *Audited*, serta mengungkapkannya secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Kantor Wilayah DJPb/Satker Pusat yang tidak mengalami perubahan nilai laporan keuangan TA 2017 *Unaudited*, agar menyampaikan **softcopy** laporan keuangan tingkat wilayah/satker pusat periode tahun anggaran 2017 *Audited* melalui alamat email aklapsetditjenpbn@gmail.com.
3. *Hardcopy* dan *softcopy* laporan keuangan tingkat wilayah/satker pusat TA 2017 *Audited* agar disampaikan selambat-lambatnya hari Rabu tanggal 16 Mei 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Haryana
NIP. 19600603 198502 1001 **8**

**NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN UNIT ESELON I
DITJEN PERBENDAHARAAN (BA 015) TAHUN 2017
YANG DIMASUKKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2017 (AUDITED)**

Nomor :/PB.6.4/2018

NKF - 015.08 / 22 / PB.6 / 2018

Pada hari ini, **Kamis tanggal 29 Maret 2018**, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah menyepakati dan menyetujui angka-angka dalam **Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Unit Eselon I Ditjen Perbendaharaan (BA 015) Tahun 2017**, sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, sebagai bentuk asersi final atas **Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Unit Eselon I Ditjen Perbendaharaan (BA 015) Tahun 2017** dan untuk dikonsolidasikan dalam **LKPP Tahun 2017 (Audited)**.

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangka penetapan asersi final Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penyesuaian angka-angka pada LKKL/LK BA BUN (*Unaudited*) dilakukan sesuai hasil rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Barang Milik Negara). Hasil rekonsiliasi juga telah memasukkan usulan koreksi audit Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka **Kementerian Keuangan Unit Eselon I Ditjen Perbendaharaan** menyetujui akan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2017 (*Audited*) beserta rinciannya secara lengkap sesuai dengan angka dalam **Lampiran Nota Kesepakatan** ini kepada Biro Perencanaan dan Keuangan (dhi. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan menyampaikan Laporan BMN kepada Biro Perlengkapan (dhi. Bagian Penatausahaan BMN) **paling lambat tanggal 4 April 2018**.

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Kementerian Keuangan RI,
(BA 015)



Anne Serfiana
NIP 196506271987032001

Kepala Bagian Keuangan,
Ditjen Perbendaharaan



Sakop
NIP 196811221990011001

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Kekayaan Negara
Selaku Tim Penyusun LBMN



Ketut Arimbawa
NIP 196902241989121001

Kabag Penatausahaan BMN
Biro Perlengkapan Kemenkeu



Sumartono
NIP 197101051990121003

MENGETAHUI
Tim Auditor BPK



Fitrawan
NIP 197609212003121006

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Perbendaharaan
Selaku Tim Penyusun LKPP



Denny F. Singawiria
NIP 196502101986031001

Tim Reviu Inspektorat
Jenderal



M. Kayani
NIP 196206151983021001

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

JURNAL KOREKSI KEMENTERIAN

Kementerian Negara : [015] Keuangan Republik Indonesia
Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Non :
Tang : 31 Desember 2017
Tahun : 2017

Periode (Bulan) : Desember 2017
Keterangan :

Jenis : ☒ Periode Berjalan
☐ Periode Sebelumnya

No	Jenis Koreksi	Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Akun Akrua	Uraian Akun Akrua	Kode Pos Akrua	Akun Kas	Uraian Akun Kas	Kode Anggaran	Kode Pos Kas	Debit	Kredit	Keterangan
1	K	01508	527158	KPPN Purwakarta	219962	Utang Perwalin Bendahara yang Belum Disampaikan Kepada yang Berhak	NC2199			99	0099	3,655,000		Koreksi Kementerian Keuangan
	K	01508	527158	KPPN Purwakarta	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	NC2121			99	0099		3,655,000	Koreksi Kementerian Keuangan
2	K	01508	652449	KPPN Bekasi	219962	Utang Perwalin Bendahara yang Belum Disampaikan Kepada yang Berhak	NC2199			99	0099	1,625,000		Koreksi Kementerian Keuangan
	K	01508	652449	KPPN Bekasi	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	NC2121			99	0099		1,625,000	Koreksi Kementerian Keuangan
3	K	01508	527010	KP DJPb	219962	Utang Perwalin Bendahara yang Belum Disampaikan Kepada yang Berhak	NC2199			99	0099	3,543,061,200		Koreksi Kementerian Keuangan
	K	01508	527010	KP DJPb	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	NC2121			99	0099		3,543,061,200	Koreksi Kementerian Keuangan
4	B	01508	528221	KPPN Samarinda	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LP3005			99	0099	6,917,933		Koreksi atas temuan BPK
	B	01508	528221	KPPN Samarinda	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	NC1361			99	0099		6,917,933	Koreksi atas temuan BPK
	B	01508	528221	KPPN Samarinda	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	NC1152			99	0099	6,917,933		Koreksi atas temuan BPK
	B	01508	528221	KPPN Samarinda	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LP3005			99	0099		6,917,933	Koreksi atas temuan BPK
	B	01508	528221	KPPN Samarinda	504711	Beban Penyisihan Piutang PNBP	LO1222			99	0099	349,590		Koreksi atas temuan BPK
	B	01508	528221	KPPN Samarinda	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	NC1162			99	0099		349,590	Koreksi atas temuan BPK
5	B	01508	527010	KP DJPb	596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	LO2132			99	0099	5,048,868,340		Koreksi atas temuan BPK dan akan diungkapkan di CaLK
	B	01508	527010	KP DJPb	117111	Barang Konsumsi	NC1171			99	0099		5,048,868,340	Koreksi atas temuan BPK dan akan diungkapkan di CaLK
	K	01508	527010	KP DJPb	117111	Barang Konsumsi	NC1171			99	0099	531,761,210		Koreksi atas temuan BPK dan akan diungkapkan di CaLK
	K	01508	527010	KP DJPb	593111	Beban Persediaan konsumsi	LO1212			99	0099		531,761,210	Koreksi atas temuan BPK dan akan diungkapkan di CaLK
	K	01508	527010	KP DJPb	117111	Barang Konsumsi	NC1171			99	0099	759,473,907		Koreksi atas temuan BPK dan akan diungkapkan di CaLK
	K	01508	527010	KP DJPb	481511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	LO2131			99	0099		359,473,907	Koreksi atas temuan BPK dan akan diungkapkan di CaLK
	K	01509	527011	KP DJPb	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	LO2132			99	0099	67,113,357		Koreksi atas temuan BPK dan akan diungkapkan di CaLK
	K	01510	527012	KP DJPb	117111	Barang Konsumsi	NC1171			99	0099		67,113,357	Koreksi atas temuan BPK dan akan diungkapkan di CaLK
6	B	01508	409999	BPOPKS	525113	Beban Jasa	LO1213			99	0099	130,080,000		Koreksi atas temuan BPK dan akan diungkapkan di CaLK
	B	01508	409999	BPOPKS	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	NC1141			99	0099		130,080,000	Koreksi atas temuan BPK dan akan diungkapkan di CaLK
7	B	01508	409999	BPOPKS	111911	Kas dan Bank - BLU	NC1119	1,5631	Piutang dari Kas BLU	10	1110	7,200,000		Koreksi atas temuan BPK dan akan diungkapkan di CaLK
	B	01508	409999	BPOPKS	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran yang Lalu	LO2131	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran yang Lalu	10	4210		7,200,000	Koreksi atas temuan BPK dan akan diungkapkan di CaLK

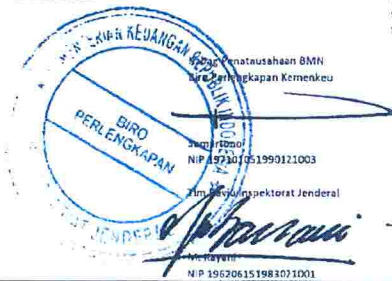
No	Jenis Koreksi	Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Akun Akruai	Uraian Akun Akruai	Kode Pos Akruai	Akun Kas	Uraian Akun Kas	Kode Anggaran	Kode Pos Kas	Debit	Kredit	Keterangan
8	B	01508	409999	BPD PKS	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	NC1211			99	0099	642,116,924,551		Koreksi atas temuan BPK dan akan diungkapkan di CaLK
	B	01508	409999	BPD PKS	525117	Beban Pengeluaran Dana Perkebunan Kelapa Sawit	LO1213			99	0099		642,116,924,551	Koreksi atas temuan BPK dan akan diungkapkan di CaLK
9	K	01508	634260	KANWIL DJPN PROVINSI BANTEN	391114	Revaluasi Aset Tetap	LP3004			99	0099	36,318,000		Koreksi Kementerian Keuangan
	K	01508	634260	KANWIL DJPN PROVINSI BANTEN	183111	Gedung dan Bangunan	NC1381			99	0099		36,318,000	Koreksi Kementerian Keuangan
	K	01508	634260	KANWIL DJPN PROVINSI BANTEN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	NC1372			99	0099	24,210,490		Koreksi Kementerian Keuangan
	K	01508	634260	KANWIL DJPN PROVINSI BANTEN	391114	Revaluasi Aset Tetap	LP3004			99	0099		24,210,490	Koreksi Kementerian Keuangan
	K	01508	634260	KANWIL DJPN PROVINSI BANTEN	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	NC1372			99	0099	157,240		Koreksi Kementerian Keuangan
	K	01508	634260	KANWIL DJPN PROVINSI BANTEN	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	LO1221			99	0099		157,240	Koreksi Kementerian Keuangan
J U M L A H												652,072,683,751	652,072,683,751	

Jenis Koreksi:

- K : Jurnal Koreksi dan Kementerian Keuangan
- I : Jurnal Koreksi dari Direktorat Jenderal
- B : Jurnal Koreksi dan BPK

Kode Anggaran:

- 00 : Anggaran
- 10 : Realisasi
- 21 : Realisasi Pengeluaran
- 99 : Tidak Terikat Buku Besar Kas
- 99 : Tidak Terikat Buku Besar Kas



Kepala Badan Kepegawaian
Kantor Staf Menteri

NIP 197301751990121003

Ditjen Perencanaan

NIP 196206151981071001

Kepala Bagian Akap (BA 015)

Anggota Staf
NIP 196506271987032001

Tim Auditor BPK

NIP 197609212003121006



Jakarta, 29 Maret 2018

Kepala Badan Kepegawaian
Ditjen Perencanaan

NIP 196811221990011001

Ditjen Perencanaan

NIP 196507101986031001

Ditjen Kekayaan Negara
Sebagai Tim Penyusun LBMN

NIP 196902741989121001